

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Didik Mukrianto, 2022, *Penumpang Gelap Demokrasi: Melihat Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Dunia dan di Indonesia*, Rakyat Merdeka Books, Jakarta.
- Jimly Asshidiqqie, 2006, *Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid I*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Jimly Asshidiqqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang.
- Hajar M, 2017, *Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Kalimedia, Yogyakarta.
- Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rianto Adi, 2000, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Saldi Isra, 2013, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2011, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Sigit Spto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Subakti Ramlan, Supriyanto Didik, dan Asy'ari Hasyim, 2011, *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, Kemitraan bagi Pembaharuan Tata pemerintahan*, Jakarta Selatan.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, Alumni, Bandung.
- Zainal Arifin Mochtar, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, EA Books, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

C. Kamus

Hendry Campbell Black, 1978, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, United State of American.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (online), <https://kbbi.web.id/legislasi>.

Kamus Merriam-Webster.com, 2023, *Bebek lumpuh*, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/lame%20duck>.

Brian P. Smentkowski, "Twentieth Amendment United States Constitution", Britannica, 2013, <https://www.britannica.com/topic/Twentieth-Amendment>.

D. Tesis

Copeland Nagle, John, 2003, "The Lame Ducks of Marbury", *Constitutional Commentary University of Minnesota Law School*, Minnesota.

Pangestu, Amar, Ridhwan, 2022, "Akibat Hukum Rancangan Undang-Undang yang Disetujui Bersama DPR dan Presiden Tetapi Tidak Ditandatangani Presiden", Tesis UPN Veteran, Yogyakarta.

Rujito, Andar, 2011, "Pengaturan Sistem Pemerintahan Indonesia Sesudah Amandemen UUD 1945 (Studi Atas Kekuasaan Presiden).", Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

E. Jurnal

Afwan, Deri, 2023, "Pasal-Pasal Kontroversial dalam RKUHP 2019 Ditinjau dari Pembaharuan Hukum", *Jurnal Iman dan*, Vol.3 No.2.

Agustina, Sagita Purnomo, "Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Vol. 5 No. 2

Airlangga, Shandi, Patria, 2019, "Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis", *Jurnal Cepalo* Vol. 3 No. 1.

Arsil, Fitra, Ariesy Tri Mauleny, dan Ryan Muthiara Wasti, "Kegiatan Pembuatan Undang-Undang pada Masa Lame Duck di Indonesia (1997-2020)", *Parlementaria* 76, no.1.

Beth, S, Richard, and Jessica Tollestrup, 2014, "Lame Duck Sessions of Congress, 1935- 2012 (74th-112th Congresses)".), <https://sgp.fas.org/crs/misc/RL33677.pdf>.

Bimasakti Adiguna, Muhammad, 2024, "Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *APHTN-HAN:Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Vol.2, No.1.

- Hikmawati, Puteri, 2022, "Urgensi Revisi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Pusat Penelitian Bidang politik, hukum, dan keamanan Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIV, No.3/I.
- Hudiburg, Jhon.A, 2020, "Lame duck sessions of Congress, Lame Duck Sessions of Congress", vol. 74th-115.
- Isra, Saldi, "Hubungan Presiden Dan DPR", Jurnal Konstitusi Vol.10, no.1.
- Jenkins, Jeffery A. dan Nokken, Timothy P., 2008, "Partisanship, the Electoral Connection, and Lame-Duck Sessions of Congress", 1877-2006," The Journal of Politics 70, No.2.
- Jeffery A. Jenkins, Timothy P. Nokken, 2006, "Investigating the "Norris Thesis": Presidential Influence, Party Power, and Lame-Duck Sessions of Congress", Academia: Political Science, 1877-1933.
- Muhsinhukum, M. 2021, "Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Hukum Das Sollen, hlm. 10.
- Copeland Nagle, John, 2012, "Lame Duck Logic", Notre Dame Law School, Vol.45.
- Nurmila, Helga, 2021, "Polemik Pemberlakuan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Antologi Peraturan Perundang-Undangan Hukum Tata Usaha Negara", Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol. 1 No. 2.
- Nuryadin, 2022, "Urgensi Pengaturan Lame Duck Session (Sesi Bebek Lumpuh) dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I 9, No.6.
- Oksalin Girysvia Ulaan, Dani Robert Pinasang, Josepus J. Pinori, 2024, "*Fungsi Legislasi Dalam Periode Lame Duck Dalam Lembaga Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia*", Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol.13, No.04.
- P.E.D, Antari, 2020, "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia". Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4. No.2.
- Pirmansyah, Miki, 2014, "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia," Jurnal Cita Hukum, Vol.2, No.1.
- Purawan, Akhmad, Adi, "KORUPSI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN", Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , Vol.3, No. 3.
- Raihan Muhammad, 2024, "Urgensi Pengaturan Kekuasaan Legislatif di Masa Lame Duck Mengoptimalkan Konstitusionalisme", Jurnal Studi Konstitusi Dan Tata Kelola, Vol.1.
- Sugiman, S, 2020, "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.10, No.2.
- Rahayu Prasetyaningsih, 2017, "Menakar kekuasaan presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut undang-undang dasar 1945", Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol.04, No.2.
- Riswanto, Agus, 2016, "*Strategi Politik-Hukum Meningkatkan Kualitas Kinerja DPR Ri Dalam Produktivitas Legislasi Nasional*," Jurnal Cita Hukum, Vol.4, No. 2.
- Santio, Erik., Nasution, Bahder, Johan, 2021, "Analisis kewenangan presiden republic Indonesia di bidang legislative menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", Journal of Constitutional Law, Vol. 1 No. 1.

- Satresna, Dhezya, Pandu, “Pengaturan Metode Omnibus Law dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, JAPHTN-HAN, Vol. 2, No.1.
- Sihombing, Eka N.A.M, Cynthia Hadita, 2023, “Kewenangan Presiden Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial”, Jurnal Reformasi Hukum, Vol.27, No.1.
- Suhayati, Monika, 2014, “*Kontroversi Perpu Pilkada dan Perpu Pemda*”, Info Singkat Hukum, Vol. VI, No. 20.
- Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia.
- Tumuhu, Norisman, 2013, “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)”, Jurnal Lex Administratum, Vol.1, No.2.
- Winda Wijayanti, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUUX/2012),” Jurnal Konstitusi” Vol. 10 No. 1.
- Zuliandri, Muhammad, Faishal, Isharyanto, 2021, “Wewenang presiden dalam penyelenggaraan negara terkait pemindahan ibukota negara”, Res Publica, Vol. 5 No.1.

F. Internet

- Alwi Rahman Kusnandar, 2025, Revisi UU TNI Tuai Penolakan, Ini yang Menjadi Kekhawatiran Publik!, <https://umj.ac.id/justinfo/revisi-uu-tni-tuai-penolakan-ini-yang-menjadi-kekhawatiran-publik/>.
- Arie Riswandy, 2024, “Formappi Kritik DPR Bentuk 'Badan Aspirasi': Cuma Gimik Seolah Peduli”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional>.
- Asprilla Dwi Adha, 2025, “Revisi UU TNI: 'Militer itu tidak pernah demokratis' – Apa bahayanya jika TNI merambah dunia sipil?”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj4npvqddq78o>.
- Asrul Ibrahim Nur, 2014, “Kontroversi UU MD3”, The Indonesian Institute, <https://www.theindonesianinstitute.com/kontroversi-uu-md3/>.
- Austria, “The Federal Constitution Law Of 1920, Chapter II: Legislation Of Federation”, Section A, Article 27 (1), <http://constitutionnet.org/sites/default/files/Austria%of>.
- BBC News, 2025, Revisi UU TNI: “Militer itu tidak pernah demokratis”-Apa bahayanya jika TNI merambah dunia sipil?, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj4npvqddq78o>.
- Bhaktiarsa Bagus, 2018, “Melawan UU MD3: Makna Tanda Tangan Presiden”, <https://news.detik.com/kolom/d-3928773/melawan-uu-md3n>.
- BEM UMY, 2020, “Kajian RKUHP”, <https://bem.umy.ac.id/elementor-31310/>.
- Chandra Gian Asmara, 2019, “Jadi Polemik, RUU KUHP Bakal Disahkan Desember 2019?”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/2019>.
- CNN Indonesia, 2024, “Poin-poin Kontroversial dalam RUU Penyiaran”, <https://www.cnnindonesia.comn>.
- Debora Sanur L, Uly Ngesti Pratiwi, 2024, “Perspektif Ruu Kementerian Negara Dalam Era Modernisasi Pemerintahan”, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%of.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI, “Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Kelima Tahun Sidang 2018-2019”, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen>.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI, “Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2013-2014”, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen>.

- Dprd, 2018, "Kontroversi terkait terbitnya UU MD3", <https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/ar8>.
- Fahmi Ramadhan Firdaus, 2021, "Apakah praktik lame duck session dikenal di parlemen indonesia", <https://www.hukumonline.com/klinik/>.
- Fat, 2009, "Beda Nasib Tiga RUU Kontroversial di Tahun 2009", <https://www.hukumonline.com/berita1>.
- Ghofir surya pranata, 2019, "Kontroversi Revisi UU KPK, SLC Selenggarakan Forum Diskusi", <https://syariah.uinsaid.ac.id/kontroversi-revisi-uu-kpk-slc-selenggarakan-forum-diskusi/>.
- ICJR, 2014, "ICJR Jalani Sidang Kedua Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi", <https://icjr.or.id/icjr-jalani-sidang-kedua/>.
- Komisi II, 2009, "Komisi II selesaikan kekacauan DPT dalam Pemilu", <https://old.dpr.go.id/berita/detail/id/281/t/KOMISI%2U>.
- Haryanti Puspa Sari, Bayu Galih, 2019, "DPR Sahkan 91 Undang-Undang Selama Masa Bakti 2014-2019", <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/01/0534009>.
- Humas Panrb, 2024, UU Wantimpres Resmi Disahkan di Rapat Paripurna DPR, Menteri PANRB: Wantimpres Jadi Mitra Sran Strategis Ke Presiden, <https://www.menpan.go.id/site/bn>.
- Humas Fraksi PKS, 2023, "Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa", <https://fraksi.pks.id/2023/07/11/a/>.
- Ijar Karim, 2024, "Apakah Itu Lame Duck? Istilah Bebek Lumpuh yang Terdengar di Masa Akhir Jabatan Jokowi", <https://r.search.yahoo.com/>.
- Jack Walter Peltason, 2004, "About America: The Constitution Of The United States Of America With Explanatory Notes", World Book, California, <https://www.govinfo.gov/>.
- Jessica Helena Wuysang, 2019, "Revisi UU KPK: Pasal apa saja yang dianggap akan 'melemahkan' KPK?", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia>.
- Kiki Safitri, Fitria Chusna Farisa, 2024, "Pro-Kontra Pengesahan UU Wantimpres dan Munculnya Kekhawatiran soal Bagi-bagi Kekuasaan", <https://nasional.kompas.com/read/2024/0911>.
- Kristian Erdianto, Fabian Januarius Kuwado, 2019, "Ini 7 Poin Revisi UU KPK Beserta Catatan Kritisnya...", <https://r.search.yahoo.com>.
- M. Rosseno Aji, 2022, "Pasal - pasal Kontroversial dalam RKUHP", <https://www.tempo.co/hukum/>.
- Muhammad Adiguna Bimasakti, 2023, "Catatan Evaluasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP)", <https://www.ptun-mataram.go.id/>.
- Mochamad Januar Rizki, 2024, "Pasal Karet dalam UU ITE Terbaru Masih Mengancam Masyarakat yang Kritis", <https://www.hukumonline.com>.
- Nandito putra, 2024, "Kontroversi dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden", <https://www.tempo.co/politik/5>.
- Rizky Argama, , 2014, "Kontroversi UU Pilkada: Tolak Upaya Penyelamatan Citra Yang Dilakukan Presiden SBY , Serahkan Kepada MK Dan Pemerintahan Baru", <https://www.pshk.or.id/publikasi/siaran-/>.
- Riswandy, Arie, 2024, "Formappi Kritik DPR Bentuk 'Badan Aspirasi': Cuma Gimik Seolah Peduli", <https://www.cnnindonesia.com/nasional>.

- Pan Mohamad Faiz, 2007, "Perbandingan Hukum (1)", <https://panmohamadfaiz.com/2007/02/17/perbandingan-hukum-1/>.
- Qithfirul Fahmi, 2024, "*Pakar HTN FH UMJ Tanggapi Polemik RUU Kementerian Negara*", <https://umj.ac.id/opini-1/pakar-htn-fh-umj-tanggapi-polemik-ruu-kementerian-negara/>.
- Mahkamah Konstitusi, 'Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang', <https://www.mkri.id/4>.
- Muhammad Raihan Nugraha, 2024, "Kewenangan Presiden Mengangkat Menteri", <https://www.hukumonline.com>.
- NCC, 2020, "How the 20th Amendment made lame-duck sessions less lame", <https://constitutioncenter.org/blog/how-the-20th-amendment-made-lame-duck-sessions-less-lame>.
- Nick Assinder, (6 Mei 2005). "Apa yang terjadi sekarang dengan Blair?". bbc.co.uk. BBC. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 Februari 2021.
- Nur Fitriatus Shalihah, Rizal Setyo Nugroho, 2020, "Hari Ini dalam Sejarah: KNIP, Cikal Bakal DPR RI Dibentuk", <https://www.kompas.com/tren/read>.
- PSHK Indonesia, 2023, "Jalur Lambat RUU Perampasan Aset di Tahun Pemilu," YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=GKbG4tnPbMo&t=3084s>.
- Rachel Nerda Catherine, Bagus Santoso, 2024, "Kaleidoskop 2024: Kontroversi Sejumlah RUU, dari RUU Pilkada hingga RUU Penyiaran", <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/26/165717111>.
- Rakhmat Nur Hakim, Diamanty Meiliana, 2018, "Sejumlah Kontroversi di UU MD3 yang Tak Ditandatangani Jokowi", <https://kmp.im/app6https://nasional.kompas.1>, Diakses pada tanggal 26 Mei 2025, Jam 15.27 WIB.
- Rizki, M. Januar, 2018, "Ini Pasal 'Ambigu' dalam UU Narkotika", <https://www.hukumonline.com/>.
- Rosariandoko Wijanarko, 2024, "PMK Nomor 131 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)", <https://online.binus.ac.id/accounting/2025/01/13/pmk-nomor-131-tahun-2024/>.
- Sahran Raden, 2021, "Kompleksitas pemilu 2024 dan kedudukan hukum (Rechtspositie) Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan jadwal pemilu 2024", <https://kab-bn.kpu.go2024>.
- Set. Badan Legislasi DPR RI, 2014, "Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024" <https://berkas.dpr.go.id>.
- Silmi Nurul Utami, Nibras Nada Nailufar, 2021, "Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif", <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/26/144419469/kekuasaan-presiden-dalam-bidang-legislatif>.
- Tasrief Tarmizi, 2018, "DPR dorong revisi UU Narkotika segera diselesaikan", <https://www.antaranews.n>.
- Willa Wahyuni, 2023, "Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/presidential-threshold-dalam-pemilihan-umum-lt6492e3be9c601/>.